KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NOMOR SOP	:	W.16.UM.01.01-1423
TGL. PEMBUATAN	:	12 Februari 2024
TGL. EFEKTIF	:	12 Februari 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : MUHAMMAD TITO ANDRIANTO NIP. 19780114 199703 1 001
NAMA SOP	:	Pencetakan Sertifikat Apostille

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing) lembaran negara republik indonesia nomor 3 tahun 2021.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (berita negara republik indonesia nomor 98 tahun 2022)
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ·Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 tahun 2022 tentang daftar jenis dokumen layanan legalisasi apostille pada dokumen publik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Peraturan tentang Layanan Apostile;
2. Memahami alur pelaksanaan SOP;
3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi;
4. Dapat mengoperasikan alat perekat sertifikat apostille.

KETERKAITAN :

- KeterkaitanKementerian/Lembagadi Tingkat Wilayah :
  1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
  4. Notaris.
- Keterkaitan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat:
  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
  2. Instansi Terkait.

KELENGKAPAN PERSYARATAN :

1. KTP Pemohon;
2. Surat Kuasa apabila diwakilkan;
3. Dokumen yang akan direkatkan dengan Sertifikat Apostille;
4. Bukti Bayar PNBP Apostille.

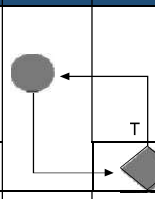
PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Layanan Pencetakan Sertifikat Apostille akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Penerima Dokumen	Petugas Administrasi	Kasubbid Pelayanan AHU	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	keterangan
1	Pemohon mengajukan permohonan layanan pencetakan sertifikat Apostille								Dokumen	5 Menit	Tanda Terima	
2	Petugas Penerima melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan								ATK	5 Menit	Dokumen	Verifikasi Dokumen
3	Petugas Administrasi melakukan pengecekan permohonan di website admin Apostille Kantor Wilayah								ATK, Komputer	5 Menit	Dokumen	Akun Admin Apostille Kantor Wilayah
4	Petugas Administrasi mencetak dan merekatkan Sertifikat Apostille ke dokumen Pemohon								ATK, Komputer, Printer, Alat Perekat Sertifikat Apostille	8 menit	Dokumen	
5	Pemohon mengisi buku daftar serah terima Sertifikat Apostille								dokumen	5 Menit	Paraf	Buku Serah Terima Sertifkat Apostille

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi